

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Keamanan Laut Republik Indonesia. (n.d.). *Tugas dan Fungsi Bakamla*. Diakses tanggal 27 April 2022, dari https://bakamla.go.id/home/tugas_fungsi
- Badan Pemeriksa Keuangan. (n.d.). *Sejarah BPK RI*. Diakses tanggal 28 April 2022, dari <https://www.bpk.go.id/menu/sejarah>
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2008). *Petunjuk Teknis Penetapan Batas Materialitas*.
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2012). *Buletin Teknis Nomor 01 Pelaporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah*.
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2016). *Keputusan BPK RI Nomor 2/K/I-XIII.2/2/2016 tentang Panduan Pemeriksaan LKPP/LKKL/LKBUN*.
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2017). *Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)*.
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2020). *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Badan Keamanan Laut Tahun 2019*.
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2021). *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Badan Keamanan Laut Tahun 2020*.
- Damanik, S. & Shauki E. R. (2019). Analisis opini laporan hasil pemeriksaan BPK RI (studi kasus pada Badan Keamanan Laut RI). *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 4(4), 385-402.
- Lestari, I. A. (2020). Pengaruh Kesesuaian Standar Akuntansi Pemerintah, Efektivitas Pengendalian Internal Pemerintah, Kecukupan Pengungkapan dan Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tegal pada Opini Tahun 2018.
- Pemerintah Indonesia. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003*.
- Pemerintah Indonesia. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004*.

Pemerintah Indonesia. (2006). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006*.

Pemerintah Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010*.

Pemerintah Indonesia. (2014). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 178 Tahun 2014*.